

Penetapan Pimpinan dan Fraksi DPRD Kota Bekasi Periode 2024-2029 Ini Nama-namanya

Category: Daerah
21 September 2024



Penetapan Pimpinan dan Fraksi DPRD Kota Bekasi Periode 2024-2029 Ini Nama-namanya

Prolite – DPRD Kota Bekasi menggelar rapat paripurna pengumuman pengusulan calon pimpinan dan penetapan calon pimpinan definitif DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029 dan pengumuman susunan dan keanggotaan fraksi-fraksi DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029.

“Penetapan Ketua Dewan dan Fraksi berlangsung kemarin, (Jumat 20 September 2024) siang,” ungkap Plt Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Alexander Zulkarnaen.

Pimpinan DPRD Kota Bekasi bakal diisi parpol-parpol pemenang Pileg 2024. Yaitu, PKS (11 kursi), PDI Perjuangan (9 kursi), Partai Golkar (8 kursi) dan Partai Gerindra (6 kursi).

Informasinya, PKS bakal mengusulkan Sardi Effendi, PDI Perjuangan Oloan Nababan, Partai Golkar Faisyal dan Partai Gerindra Puspa Yani.

Sementara fraksi-fraksi yang akan terbentuk, antara lain FPKS (PKS), FPDIP (PDIP), Fraksi Partai Golkar (Partai Golkar dan PSI), Fraksi Gerindra (Gerindra dan Demokrat), Fraksi PKB (PKB), dan Fraksi PAN (PAN dan PPP).

Berikut jumlah kursi parpol di DPRD Kota Bekasi:

PKS 11 kursi

PDIP 9 kursi

Partai Golkar 8 kursi

Partai Gerindra 6 kursi

PAN 5 kursi

PKB 5 kursi

Partai Demokrat 2 kursi

PPP 2 kursi

PSI 2 kursi

Penataan 10 Ribu PKL, DPRD Kota Bekasi Garap Payung Hukum

Category: Daerah

21 September 2024



Penataan 10 Ribu PKL, DPRD Kota Bekasi Garap Payung Hukum

Prolite – Program penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bekasi tak cuma berakhir pada aksi penertiban dan relokasi.

Di sisi lain, DPRD Kota Bekasi tengah menggarap sebuah regulasi yang akan menjadi payung hukum program penataan PKL. Tak hanya membahas soal penertiban, regulasi ini juga akan memuat program permodalan untuk para PKL, dimana dananya berasal dari APBD.

Informasi yang didapat Radar Bekasi, draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan pedagang kaki lima sudah ditahap konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Dariyanto menyampaikan, Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima didasari atas perubahan peraturan di tingkat kementerian. Perda tersebut nantinya akan menjadi payung hukum terhadap penganggaran dari keuangan daerah, salah satunya untuk akses

permodalan.

"Kedua, kita buatkan payung hukum agar dalam penganggaran APBD itu bisa dimasukkan," katanya.

Dalam regulasi ini nantinya pedagang kaki lima digolongkan dalam beberapa jenis. Sesuai dengan media berjualan dan bangunan yang digunakan. Dariyanto juga menyampaikan bahwa kedepan pemerintah tidak sekadar melakukan pendataan terhadap PKL.

"Dengan adanya perda ini mereka akan lebih diakui (mendapat kepastian hukum), lebih bisa terjamin mereka dalam berusaha. Tentu dengan mengikuti ketentuan zonasi dan golongan yang diatur," ucapnya.

Terakhir menyangkut dengan keindahan kota, penataan dan pemberdayaan PKL diperlukan seiring dengan semakin bertambahnya jumlah PKL di Kota Bekasi. Diharapkan para pedagang kaki lima dapat tertata lebih rapih dan layak dalam menjalankan usahanya.

"Tentunya dengan peningkatan pendapatan dari masyarakat itu akan kembali lagi pada pemasukan bagi pemerintah kota. Karena ada zonasi yang diatur dan juga ada retribusi yang dipungut untuk PAD Kota Bekasi," tambahnya.

Sekadar informasi Perda Penataan dan Pemberdayaan sbelumnya terbit pada tahun 2015. Sembilan tahun berjalan, jumlah pedagang kaki lima di Kota Bekasi saat ini berkisar di angka 10 ribu pedagang kaki lima.

Gelar Rapat Paripurna Pembentukan Fraksi DPRD, PSI Gabung Golkar, Demokrat-PPP Masih Tercecer

Category: Daerah
21 September 2024



Gelar Rapat Paripurna Pembentukan Fraksi DPRD, PSI Gabung Golkar, Demokrat-PPP Masih Tercecer

Prolite – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mulai menjalani Rapat Paripurna demi tahapan pembentukan unit kerjanya. Mulai dari membentuk fraksi, penunjukan pimpinan, dan mengisi alat kelengkapan dewan (AKD).

Jumat ini, jajaran legislatif kota patriot ini akan menggelar rapat paripurna perdananya terkait penyampaian pembentukan fraksi.

“Rencananya Selasa kita akan paripurna ya. Mudah-mudahan

(surat) seluruh fraksi sudah masuk dan saya berharap surat untuk pimpinan definitif sudah masuk," ungkap Ketua Sementara DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah.

Sejauh ini hanya enam partai yang mampu membentuk fraksi sendiri. Di antaranya, Fraksi PKS, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKB.

Di luar itu, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang hanya mampu mengirimkan masing-masing dua orang wakilnya, masih tercecer. Belakangan, PSI dikabarkan bergabung dengan Fraksi Golkar.

"PSI masuk ke Fraksi Golkar, sudah berkirim surat ke kita," kata Plt Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Alexander Zulkarnain.

Usai pembentukan fraksi, para anggota DPRD kemudian akan melakoni tahapan penunjukan jajaran pimpinan. Terdapat empat partai yang berhak mengisi jajaran elite tersebut. Masing-masing PKS, PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra.

Masing-masing parpol berhak mengusulkan nama pimpinan definitif untuk dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat lalu kemudian diparipurnakan.

Usai memiliki pimpinan, para anggota dewan lalu membahas komposisi pembentukan AKD yang disambung dengan penyusunan draft Tata Tertib DPRD.

"Setelah itu dibentuk pansus oleh pimpinan definitif, baru setelah itu AKD," tambahnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan: Perjuangan Kepala Daerah Terdahulu Tidak Boleh Dirusak

Category: Pemerintahan

21 September 2024



Anggota DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan: Perjuangan Kepala Daerah Terdahulu Tidak Boleh Dirusak

Prolite – Mendekati Pilkada 2024, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan mengingatkan agar perjuangan wali kota Bekasi terdahulu dalam membangun Kota Bekasi tidak

boleh dirusak.

Perjunagn Wali Kota Bekasi terdahulu yang sudah membagun kepercayaan di hadapan masyarakat di harap bisa di lanjutkan tanpa di rusak.

Membangun kepercayaan publik memang tidak mudah maka dari itu ketika sekarang sudah harus melanjutkannya dengan baik.

“Bagaimana dulu waktu jaman wali kota mulai dari pak Kailani, Nonon Sonthanie, Akhmad Zurfaiah, Mochtar Mohamad, Rahmat Effendi, Tri Adhianto, sudah rapi-rapi mereka membangun itu,” jelas Nuryadi Darmawan .

Hal ini ia sampaikan seraya menggambarkan kondisi pemerintahan di Kota Bekasi pada masa transisi saat ini. Poin penting dari wali kota terdahulu kata Nuryadi adalah perhatian terhadap aspirasi masyarakat Kota Bekasi.

“Perjuangan-perjuangan tadi itu yang sudah dilakukan oleh wali kota kita yang mencerminkan bagaimana kepedulian terhadap aspirasi masyarakat,” ungkap Nuryadi Darmawan .

Ia juga menyampaikan tujuan dari kritik yang diberikan oleh anggota DPRD, terutama komisi satu bukan semata-mata atas dasar kebencian atau sentimen pribadi. Melainkan, kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

“Teman-teeman di komisi satu selalu keras. Keras itu bukan kita membenci teman-teaman di pemerintahan atau apa,” tambahnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi

Mustofa Minta Pemkot Evaluasi OPD Penghasil

Category: Pemerintahan

21 September 2024



Anggota DPRD Kota Bekasi Mustofa Minta Pemkot Evaluasi OPD Penghasil

Prolite – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Mustofa, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk melakukan evaluasi di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil baik pajak maupun retribusi guna memaksimalkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu untuk mengenjot realisasi PAD mengingat capaian yang belum maksimal di triwulan tiga ini. “Kita ingin Pemkot Bekasi melakukan evaluasi kepada OPD yang menyumbang pendapatan. Baik itu pajak maupun retribusi. Kalau bekerja secara profesional maka saya yakin target PAD akan tercapai,” ucap Mustofa.

Lanjut dia, tidak hanya kepada pucuk pimpinan OPD saja, kepada pegawai di masing-masing OPD juga harus bekerja secara profesional. Baik itu Kepala Bidang, Kasi, jajaran kecamatan maupun kelurahan serta UPTD yang ada.

"Pimpinan daerah harus bisa menggerakkan semua jajaran di Pemerintahan agar PAD kita mencapai target. Jangan sampai potensi banyak tapi tidak terserap karena pejabat kurang profesional dalam bertugas," ujarnya.

Apalagi, di triwulan tiga ini, PAD Kota Bekasi juga belum mencapai target. Jangan sampai Kota Bekasi mengulang seperti tahun sebelumnya yang gagal merealisasikan target PAD.

"Tahun ini kita harap semua unsur di Pemerintahan bekerja secara profesional agar PAD tahun ini benar-benar tercapai 100 persen," pungkasnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Aminah Kawal Pemenuhan Sarpras Lingkungan

Category: Pemerintahan
21 September 2024



Anggota DPRD Kota Bekasi Aminah Kawal Pemenuhan Sarpras Lingkungan

Prolite – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Aminah mengaku banyak sarana prasarana lingkungan serta fasilitas penunjang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta ambulan yang masuk usulan warga perlahan terealisasi.

Dia berharap tidak hanya sarana prasarana lingkungan, termasuk infrastruktur yang saat ini masih mendominasi bisa seluruhnya terealisasi dan akan terus diperjuangkan.

Sejauh ini, aspirasi masyarakat sudah terealisasi seperti perbaikan jalan lingkungan, saluran air dan kantor sekretariat RW dan RT. Selain infrastruktur dirinya juga fokus pada sarpras penunjang kegiatan masyarakat hingga ekonomi menengah kebawah dengan pengadaan gerobak motor (Baktor), gerobak UMKM dan ambulans.

“Kita akan kawal terus aspirasi masyarakat yang belum terealisasi. Hingga akhir tahun ini mudah-mudahan terealisasi

apa yang dibutuhkan masyarakat," ujar Aminah.

Dia menyebut, untuk tahun 2024 ini karena anggaran terbatas dan ada skala prioritas sehingga tak semua bisa terealisasi. Namun ia berjanji bakal mengawal aspirasi yang masuk.

"Saya berharap apa yang menjadi aduan masyarakat 2024 bisa terealisasi. Apapun itu nantinya akan kita kawal aspirasi masyarakat di wilayah," tandasnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi Mustofa: Pemerintah Harus Melek Melihat Kebutuhan Masyarakat

Category: Pemerintahan

21 September 2024



Anggota DPRD Kota Bekasi Mustofa: Pemerintah Harus Melek Melihat Kebutuhan Masyarakat

Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diminta untuk selalu hadir menjawab kebutuhan masyarakat utamanya terkait pelayanan yang berkaitan dengan pemerintahan hingga pelayanan kesehatan.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Mustofa. Ia juga mendorong Pemkot Bekasi untuk melakukan evaluasi pelayanan, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.

“Kami (DPRD) selama lima tahun sudah (mendorong) berupaya maksimal mendekatkan pelayanan untuk warga masyarakat, seperti pendekatan layanan dasar pembuatan surat kependudukan. Saat ini layanan pembuatan KTP, KK, Surat Kematian dapat di akses di kecamatan bahkan di seluruh kelurahan,” kata Mustofa, Rabu (21/8).

Lanjut dia, kedepan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus

ditingkatkan guna menunjang kebutuhan pelayanan masyarakat dengan sistem yang lebih baik.

Pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan baik terkait pelayanan administrasi maupun pelayanan kesehatan. Upaya itu dilakukan guna memastikan seluruh masyarakat Kota Bekasi, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dapat terlayani dengan baik.

"Intinya Pemerintah harus melek melihat kebutuhan masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani dengan baik. Apalagi ada pungli. Saya meminta hal seperti itu tidak ada lagi di Kota Bekasi," tukasnya.

Anggota DPRD Faisyal Minta Siswa di Kota Bekasi Dibekali Pendidikan Kewirausahaan

Category: Pemerintahan
21 September 2024



Anggota DPRD Faisyal Minta Siswa di Kota Bekasi Dibekali Pendidikan Kewirausahaan

Prolite – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Ahmad Faisyal Hermawan menegaskan menanamkan pendidikan kewirausahaan sejak dini kepada siswa penting dilakukan. Hal ini sebagai salah satu upaya menghadapi tantangan persaingan dunia kerja yang sangat ketat.

Dia mengaku akan terus mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Bekasi. Pendidikan wirausaha mesti ditanam sejak dini. Untuk memperkuat ini, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa berkolaborasi memperkuat ilmu kewirausahaan di sekolah. Dirancang secara ideal sebagai materi pilihan di sekolah.

“Nanti mungkin Dinas Pendidikan Kota Bekasi bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM mulai dimasukkan sebagai ekstrakurikuler misalnya, jadi materi tidak wajib tapi boleh diambil,” terangnya.

Faisyal mengingatkan bahwa sektor usaha non formal ini cukup

signifikan memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Selain statistik perekonomian, UMKM juga menjadi alternatif di dunia ketenagakerjaan.

“Nah itu kan perlunya juga peran pemerintah kota untuk bisa terus merangsang warga Kota Bekasi untuk menjadi para pelaku UMKM,” ucapnya.

Menurut Faisyal, kewirausahaan mempunyai peran yang sangat penting. Dengan berwirausaha mampu menemukan inovasi dan gagasan baru dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

“Kewirausahaan merupakan proses pengembangan dan penerapan kreativitas serta inovasi dalam menyelesaikan masalah dan mampu melihat peluang untuk menciptakan suatu usaha,” terangnya.

Menurutnya, pentingnya menanamkan semangat kewirausahaan sejak dini agar siswa dapat mandiri dan kreatif di masa depan.

“Tugas kita bersama menciptakan generasi emas yang tidak hanya pintar menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan peluang dan lapangan kerja,” tambahnya.

Harapannya, para guru bisa mentransformasikan ilmu kewirausahaan mereka kepada peserta didik, bagaimanapun juga, guru itu harus bisa menginspirasi siswa-siswinya di sekolah.

Siapkan APBD 2025, Anggota DPRD Kota Bekasi Daradjat

Kardono Minta Disdik Petakan Kondisi Infrastruktur Sekolah

Category: Pemerintahan

21 September 2024



Siapkan APBD 2025, Anggota DPRD Kota Bekasi Daradjat Kardono Minta Disdik Petakan Kondisi Infrastruktur Sekolah

Prolite – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Daradjat Kardono meminta Dinas Pendidikan (Disdik) memetakan kondisi infrastruktur sekolah. Hasil dari pemetaan ini akan dijadikan dasar pengajuan anggaran pada pembahasan APBD tahun 2025.

"Kita sudah mintakan untuk menganalisis itu, nanti pada saat rapat anggaran bisa langsung coba kita ajukan sebagai bagian dari upaya perbaikan pendidikan di Kota Bekasi," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Daradjat Kardono.

Selama ini kata Daradjat, infrastruktur pendidikan memang menjadi pembahasan penting di komisi IV bersama Pemkot maupun penambahan Infrastruktur menjadi salah satu fokus dalam perencanaan APBD 2025."Untuk penambahan USB maupun penambahan unit kelas baru," tambahnya.

Infrastruktur pendidikan yang memadai, lanjutnya, menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi peserta didik."Keterbatasan fasilitas akan menyebabkan terbatasnya pendidikan yang berkualitas bagi siswa."imbuhnya.

Untuk itu, dia mendorong kepada pemerintah Kota Bekasi agar melakukan pemetaan infrastruktur Pendidikan. Menurutnya, masih ada sekolah di Kota Bekasi yang mengalami kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

"Apabila terjadinya kurangnya fasilitas sama infrastruktur maka akan menyebabkan sulitnya mencapai pendidikan yang berkualitas. Hal ini akan menghambat pembelajaran siswa yang efektif," tandasnya.

Ketua BK Syaifuddin Mendorong Anggota DPRD Harus Menjaga Marwah dan Etika Legislatif

Category: Bisnis
21 September 2024



Ketua BK Syaifuddin Mendorong Anggota DPRD Harus Menjaga Marwah dan Etika Legislatif

Prolite – Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Syaifuddin mengaku telah bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan BK. Sejak awal menjabat, ia berkomitmen untuk menjalankan peran BK dengan maksimal.

Sampai di penghujung periode 2019-2024 ini belum ada laporan masuk terkait dengan dugaan pelanggaran dipilih hingga kode etik dari seluruh anggota DPRD Kota Bekasi.

“Alhamdulillah, di kepengurusan saya belum ada laporan baik itu berkaitan dengan etika ataupun persoalan-persoalan di DPRD kota Bekasi,” katanya.

Badan Kehormatan sendiri merupakan alat kelengkapan DPRD yang memiliki tugas memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji, kode etik, dan peraturan tata tertib guna menjaga kehormatan dan citra DPRD. Dalam pelaksanaannya BK bekerja berdasarkan laporan atau pengaduan dari berbagai pihak.

Menurutnya, sebagai sesama anggota DPRD perlu saling mengingatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan etika, baik di ruang privat maupun di ruang publik.

"Harapan saya selaku BK, mari sama-sama kita menjaga marwah dan kehormatan dari lembaga kita," ungkapnya.